



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI RABU, 29 JULI 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI

Wabup Dorong Revitalisasi Sentra Kuliner Gajah Mada

KOTA-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat komitmennya dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satunya melalui rencana revitalisasi Sentra Kuliner Gajah Mada agar menjadi pusat kuliner sekaligus etalase produk unggulan UMKM Sidoarjo yang lebih representatif.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, S.A.P., saat melihat Sentra Kuliner Gajah Mada. Menurutnya, pengembangan kawasan tersebut bukan sekadar memperbaiki fisik bangunan, tetapi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan para pelaku UMKM.

Saat meninjau lokasi, Mimik menemukan sejumlah persoalan yang masih menghambat perkembangan usaha para pedagang. Mulai dari kondisi bangunan yang kurang terawat, penataan lapak yang belum maksimal, hingga adanya retakan pada beberapa



BUTUH SENTUHAN: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana saat melihat Sentra Kuliner Gajah Mada.

Sriatun Bagikan Barcode untuk Serap Aspirasi

SIDOARJO, SURTA - Anggota Komisi E DPRD Jatim dr Sriatun memantapkan misi reses untuk menyerap berbagai aspirasi di Daerah Pemilihan Dapil Sidoarjo. Di antara metode serap aspirasi yang dilakukan Sriatun adalah dengan memanfaatkan teknologi sebagai alternatif penemuan umum.

Ini dilakukan saat anggota serap aspirasi di kawasan tengah kota Sidoarjo, Senin (27/7). Peserta yang hadir adalah perwakilan pemertintah desa, pelaku UMKM hingga tokoh masyarakat. Dalam kesempatan ini, Sriatun membagikan barcode untuk mereka menyampaik-

kan aspirasi. "Jika sebelumnya masyarakat menyampaikan usulan atau keluhan dengan tulisan, kali ini karena kita sudah berada di era teknologi, kami tidak meninggalkan metode konvensional atau cara lama. Kami menggunakan kode barcode," kata Sriatun saat diinformasikan di kegiatan.

Hal tersebut menjadi salah satu terobosan yang diperkenalkan Sriatun melalui baromede, tu, mereka dapat mengetahui program apa saja yang diinisiasi oleh Pemprov Jatim. Menurutnya, program apa saja yang mereka dapatkan sebagai wakil rakyat di daerahnya. Namun demikian,

perwakilan perangkat desa ini juga bisa berkonsultasi atau menyampaikan aspirasi tentang apa yang dibutuhkan di daerah. Menurut Sriatun, pihaknya sebagai wakil rakyat akan memastikan aspirasi yang disampaikan masyarakat sesuai dengan apa yang juga menjadi perhatian pemerintah daerah atau program Pemprov Jatim. Meskipun tak menutup peluang untuk aspirasi lain. "Masalahnya ada lebih kecil atau usulan dari lingkungan mereka yang belum tercantum dalam rumusan tersebut, mereka tidak diperbolehkan aspirasi ini. Mudah-mudahan mengasinkannya."

Perencanaan di salah satu kade di Sidoarjo ini menjadi titik ketiga reses Sriatun. Sebelumnya, istri dari Bupati Sidoarjo Subandi ini menggelar serap aspirasi di kawasan Kecamatan Tulung. Tepatnya, di dua lokasi yang berbeda. Di antara aspirasi yang sudah ditampung adalah pentingnya pelatihan bagi UMKM. Kecamatan Tulung sebagai salah satu sentra mebel dan pembuatan kerajinan ini membutuhkan tambahan perhatian dari pemprov berupa pelatihan maupun akses pemasaran. Sriatun memastikan akan mengawal aspirasi ini. "Mudah-mudahan ini dapat kami sampaikan ke pemerintah provinsi agar bisa terakomodasi, terlembaidan mandudnya dradadon langsung oleh masyarakat," jelasnya.

Sebagai informasi, DPRD Jatim saat ini memang tengah memasuki masa reses. Setiap anggota DPRD Jatim akan kembali ke dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi dari masyarakat melalui berbagai pertemuan yang dilakukan. Reses ini berlangsung sejak 25 Juli dan akan berakhir pada 1 Agustus.

Sekretaris DPRD Jatim M Ali Kuncoro menjelaskan bahwa reses 120 anggota dewan ini bakal menyerap ratusan titik di Jatim. Total, ada 720 titik pertemuan dengan warga yang tersebar di seluruh anggota DPRD Jatim. "Kita Ali Kuncoro, Minggu (26/7) [jua]

konstius yang berlaku, ini adalah bagian penting bagi seluruh anggota DPRD Jatim," kata Ali Kuncoro. Minggu (26/7) [jua]

DPR RI Sidak SPPG Wonoayu, Puji Standar Keamanan Pangan

WONOAYU-Ketua Kelompok Fraksi (Kopoksi) Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono memastikan kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Pagergumbuk, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, memenuhi standar keamanan pangan.

Bahkan, usai memeriksa seluruh proses pengolahan makanan, Bambang mengaku puas dan menilai makanan yang disajikan sehat serta memiliki cita rasa yang tetap lezat meski tanpa menggunakan penyedap rasa atau Monosodium Glutamate (MSG).

● Ke Halaman 10



DPRD Sidoarjo Dukung Penertiban Toko Miras

Dorong Revisi Perda

Sidoarjo, Memorandum DPRD Sidoarjo mendukung penuh langkah Pembak menertibkan tempat hiburan yang menjual minuman keras (miras) tanpa izin, toko miras, serta praktik prostitusi yang meresahkan masyarakat.

Dukungan ini disampaikan Ketua DPRD Sidoarjo, Abdullah Nasih, bersama unsur pimpinan dan para ketua komisi dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) membahas peredaran miras, prostitusi, dan penanganan HIV/AIDS di Oporoom, Pemkab Sidoarjo, Senin (27/7).

Rapat dipimpin Bupati Sidoarjo Subandi bersama Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing. Hadir pula Ketua PCNU Sidoarjo KH Zainal Abidin, perwakilan Muhammadiyah, MUI Sidoarjo dan sejumlah kepala perangkat daerah.

Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nasih mengatakan, langkah utama yang harus dilakukan adalah penegakan hukum terhadap seluruh bentuk pelanggaran, baik terkait peredaran miras, prostitusi, maupun penyakit menular seksual.

"Yang pertama adalah penegakan peraturan atas semua pelanggaran yang ada, baik terkait miras, prostitusi, maupun yang lain. Penegakan aturan harus menjadi prioritas," ujarnya.

Selain penindakan, DPRD

juga mendorong revisi besar-besaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur ketentuan umum. Menurutnya, regulasi yang saat ini masih mengacu pada Perda tahun 2013 sudah tidak lagi relevan dengan kondisi di lapangan.

"Kita melihat Perda yang ada masih tahun 2013, sehingga saya pikir sudah tidak lagi bisa dijadikan acuan. Karena itu, harus ada revisi besar-besaran terhadap Perda ini," jelasnya.

la mengemukakan agar pengaturan mengenai peredaran miras dan prostitusi dipisahkan dari Perda Ketertahanan dan Ketertiban Umum (Tantibum). Menurutnya, DPRD akan mengkaji kemungkinan menyusun Perda khusus agar pengawasan dan penegakan hukum lebih efektif.

"Kita akan kaji bersama. Kalau memang dibutuhkan Perda tersendiri yang mengatur miras dan prostitusi, tentu akan kita upayakan," katanya.

Tak hanya itu, DPRD menyoroti keberadaan rumah kas yang dinilai berpotensi menjadi objek prostitusi di kawasan tersebut.

Oleh karena itu, regulasi mengenai pengelolaan rumah kas juga perlu diperkuat.

"Kita membutuhkan kebijakan yang bisa mengatur kos-kosan agar benar-benar terbit, aman



Forkopinda Sidoarjo foto bersama usai rapat koordinasi lintas sektor.

umuk keluarga, dan tidak disalahgunakan. Itu bisa menjadi pintu masuk munculnya berbagai bentuk penyimpangan," ungkapnya.

Ketua Komisi ADPRD Sidoarjo Rizza Ali Faizin, meminta Satpol PP tidak ragu menindak toko-toko yang menjual miras tanpa izin resmi. Ia menegaskan, hasil rapat telah menunjukkan bahwa toko-toko tersebut tidak mengindahkan izin edar dari Pemkab Sidoarjo.

"Sudah jelas bahwa toko-toko miras yang mengklaim memiliki izin ternyata dari dokumen yang ada tidak satu pun memperoleh izin edar dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya Disperindag," kata Rizza.

Menurut Rizza, setiap penjual miras wajib memiliki dua jenis perizinan, yakni izin sebagai distributor dan izin edar. Karena izin edar tidak dimiliki, Satpol PP sebagai penegak Perda diminta segera melakukan penindakan di

lapang.

"Komisi A meminta Satpol PP segera bertindak tegas. Sudah tidak ada alasan lagi untuk memunda penegakan Perda terhadap toko-toko yang melanggar aturan," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar aparat tidak membiarkan persoalan tersebut berlanjut. Apabila penegakan hukum tidak dilakukan secara tegas, dikhawatirkan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan akan bergerak sendiri melakukan penertiban.

"Jangan sampai masyarakat atau omay yang bergerak sendiri. Penegakan hukum adalah kewenangan pemerintah dan aparat penegak Perda," pungkasnya.

Maraknya peredaran minuman keras (miras) tanpa izin, serta keberadaan tempat hiburan atau rumah karaoke yang diduga tidak sesuai ketentuan dan praktik prostitusi tersebut hubung di Kabupaten

lungin.

Dalam rapat koordinasi tersebut Sekda Sidoarjo hadir bersama kepala OPD terkait seperti Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sidoarjo, Kepala Satpol PP Sidoarjo, Kepala Dinas Sosial Sidoarjo, Kepala Dinas

Kesehatan Sidoarjo, Kepala DPMPTSP Sidoarjo, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo, Kepala Disporapar Sidoarjo. Beberapa camat juga dilibatkan seperti Camat Krian, Camat Jabon dan Camat Krembung. (adv/krj/jok/fdn)

Wabup Dorong Revitalisasi Sentra Kuliner Gajah Mada

KOTA-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat komitmennya dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satunya melalui rencana revitalisasi Sentra Kuliner Gajah Mada agar menjadi pusat kuliner sekaligus etalase produk unggulan UMKM Sidoarjo yang lebih representatif.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, S.A.P., saat melihat Sentra Kuliner Gajah Mada. Menurutnya, pengembangan kawasan tersebut bukan sekadar memperbaiki fisik bangunan, tetapi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan para pelaku UMKM.

Saat meninjau lokasi, Mimik menemukan sejumlah persoalan yang masih menghambat perkembangan usaha para pedagang. Mulai dari kondisi bangunan yang kurang terawat, penataan lapak yang belum maksimal, hingga adanya retakan pada beberapa bagian bangunan yang perlu segera diperbaiki.



BUTUH SENTUHAN: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana saat melihat Sentra Kuliner Gajah Mada.

"Kita ingin UMKM berkembang. Jangan sampai para pedagang terus berjualan di tempat yang kurang nyaman dan kurang menarik bagi masyarakat. Penataan harus segera dilakukan agar mereka memiliki

peluang usaha yang lebih baik," ujar Mimik.

Menurutnya, penataan lapak juga harus dilakukan secara adil agar seluruh pedagang memiliki kesempatan yang sama mendapatkan pembeli. Selama

ini masih terdapat lapak yang berada di bagian belakang sehingga kurang terlihat oleh pengunjung. "Kalau ada pedagang yang terus sepi karena posisinya tidak strategis,

● Ke Halaman 10



Wabup Dorong Revitalisasi...

tentu harus dicarikan solusi. Semua pelaku UMKM harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang," katanya.

Selain memperbaiki kenyamanan berusaha, Mimik juga menegaskan bahwa aspek keselamatan tidak boleh diabaikan. Ia meminta pemeriksaan teknis segera dilakukan terhadap bagian bangunan yang mengalami retak agar tidak membahayakan pedagang maupun pengunjung. Sementara itu, Kepala Bidang Pem-

berdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Amat Adi Subhan, mengatakan Pemkab telah menyiapkan konsep revitalisasi yang berorientasi pada pengembangan UMKM.

Di atas lahan seluas sekitar 2.147 meter persegi, Sentra Kuliner Gajah Mada akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu yang tidak hanya menyediakan pusat kuliner, tetapi juga sentra oleh-oleh khas Sidoarjo. Kawasan tersebut juga akan dilengkapi ruang pelatihan dan pembinaan bagi pelaku UMKM agar mampu me-

ningkatkan kualitas produk, pemasaran, hingga daya saing usaha.

"Konsepnya bukan hanya tempat berjualan, tetapi menjadi pusat pengembangan UMKM Kabupaten Sidoarjo. Di sana nantinya ada ruang pelatihan sehingga pelaku usaha bisa terus meningkatkan kapasitas usahanya. Perencanaannya sudah kami susun dan akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," jelas Amat.

Rencana revitalisasi itu disambut positif para pedagang. Ali Sabana, penjual sop buntut yang telah lama

berjualan di Sentra Kuliner Gajah Mada, berharap kawasan tersebut kembali ramai seperti beberapa tahun lalu.

Ia menilai, selain penataan yang lebih baik, kegiatan pendukung seperti pertunjukan musik, senam bersama, hingga agenda rutin lainnya dapat kembali dihadirkan untuk meningkatkan jumlah pengunjung.

"Alhamdulillah kalau memang akan dikembangkan. Semoga semakin bagus dan ramai lagi seperti dulu. Kalau pengunjung ramai, otomatis omzet pedagang juga meningkat,"

harapnya.

Revitalisasi Sentra Kuliner Gajah Mada diharapkan menjadi salah satu langkah nyata Pemkab Sidoarjo dalam menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kuat. Dengan fasilitas yang lebih layak, penataan yang baik, serta pembinaan yang berkelanjutan, para pelaku UMKM diharapkan mampu naik kelas, memperluas pasar, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (dik/vga)

Ilman Baris





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DPRD Sidoarjo Dukung Penertiban Toko Miras

Dorong Revisi Perda

Sidoarjo, Memorandum DPRD Sidoarjo mendukung penuh langkah Pemkab menertibkan tempat hiburan yang menjual minuman keras (miras) tanpa izin, toko miras, serta praktik prostitusi yang meresahkan masyarakat. Dukungan itu disampaikan Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nash, bersama unsur pimpinan dan para ketua komisariat dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membahas peredaran miras, prostitusi, dan penanganan HIV/AIDS di Opssroom Pemkab Sidoarjo, Senin (27/7).

Rapat dipimpin Bupati Sidoarjo Subandi bersama Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing. Hadir pula Ketua PCNU Sidoarjo KH Zainal Abidin, perwakilan Muhammadiyah, MUI Sidoarjo dan sejumlah kepala perangkat daerah.

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nash mengatakan, langkah utama yang harus dilakukan adalah penegakan hukum terhadap seluruh bentuk pelanggaran, baik terkait peredaran miras, prostitusi, maupun penyakit masyarakat lain.

"Yang pertama adalah penegakan peraturan atas semua pelanggaran yang ada, baik terkait miras, prostitusi, maupun yang lain. Penegakan aturan harus menjadi prioritas," ujarnya.

Selain penindakan, DPRD

juga mendorong revisi besar-besaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur ketertiban umum. Menurutnya, regulasi yang saat ini masih mengacu pada Perda tahun 2013 sudah tidak lagi relevan dengan kondisi di lapangan.

"Kita melihat Perda yang ada masih tahun 2013, sehingga saya pikir sudah tidak lagi bisa dijadikan acuan. Karena itu, harus ada revisi besar-besaran terhadap Perda itu," jelasnya.

Ia mengusulkan agar pengaturan mengenai peredaran miras dan prostitusi dipisahkan dari Perda Ketertiban dan Ketertiban Umum (Thantubum). Menurutnya, DPRD akan mengkaji kemungkinan menyusun Perda khusus agar pengawasan dan penegakan hukum lebih efektif.

"Kita akan kaji bersama. Kalau memang dibutuhkan Perda tersendiri yang mengatur miras dan prostitusi, tentu akan kita upayakan," katanya.

Tak hanya itu, DPRD menyoroti keberadaan rumah kos yang dinilai berpotensi menjadi celah munculnya praktik prostitusi apabila tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, regulasi mengenai pengelolaan rumah kos juga perlu diperkuat.

"Kita membutuhkan kebijakan yang bisa mengatur kos-kosan agar benar-benar tertib, aman



Forkopimda Sidoarjo foto bersama usai rapat koordinasi lintas sektor.

untuk keluarga, dan tidak disalahgunakan. Itu bisa menjadi pintu masuk munculnya berbagai bentuk penyimpangan," ungkapnya.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Rizza Ali Faizin, meminta Satpol PP tidak ragu menindak toko-toko yang menjual miras tanpa izin resmi. Ia menegaskan, hasil rapat telah menunjukkan bahwa toko-toko tersebut tidak menganiangi izin edar dari Pemkab Sidoarjo.

"Sudah jelas bahwa toko-toko miras yang mengklaim memiliki izin ternyata dari dokumen yang ada tidak satu pun memperoleh izin edar dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Khususnya Disperindag," kata Rizza.

Menurut Rizza, setiap penjual miras wajib memiliki dua jenis perizinan, yakni izin sebagai distributor dan izin edar. Karena izin edar tidak dimiliki, Satpol PP sebagai penegak Perda diminta segera melakukan penindakan di

Sidoarjo mendapat respons serius dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo. Penanganan terpadu terhadap berbagai persoalan ini telah disiapkan. Termasuk rencana operasi penertiban besar-besaran di sejumlah lokasi.

Beberapa langkah sudah diambil oleh Pemkab Sidoarjo. Termasuk dengan mengajak pemangku kepentingan lintas sektor berkoordinasi untuk merumuskan langkah-langkah penanganan berbagai persoalan tersebut, Senin (27/7).

Koordinasi lintas sektor yang digelar di ruang rapat Delta Wicaksana Setda Sidoarjo itu dipimpin langsung Bupati Sidoarjo H Subandi. Forkopimda, termasuk Kapolresta Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo serta ketua DPRD Sidoarjo dan perwakilan Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Pengadilan Negeri Sidoarjo hadir dalam rapat koordinasi tersebut.

Tampak pula Kepala BNN Sidoarjo, Ketua PCNU Sidoarjo, serta perwakilan MUI Sidoarjo, perwakilan PD Muhammadiyah Sidoarjo, perwakilan DPD LDI Sidoarjo serta Ketua Banom PCNU Sidoarjo serta Ketua Komisi A,B,C,D DPRD Sidoarjo.

Beberapa kiai Sidoarjo juga tampak hadir dalam kesempatan itu. Terlihat Kiai Nurkholis Misbah pimpinan Ponpes Al-Amanah Jumwargi Krian serta Kiai Abdul Wachid Harun pengasuh Ponpes Manba'ul Hikmah Putat Tangga-

lengin.

Dalam rapat koordinasi tersebut Sekda Sidoarjo hadir bersama kepala OPD terkait seperti Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sidoarjo, Kepala Satpol PP Sidoarjo, Kepala Dinas Sosial Sidoarjo, Kepala Dinas

Kesehatan Sidoarjo, Kepala DP-MPTSP Sidoarjo, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo, Kepala Disporapar Sidoarjo. Beberapa camat juga dilibatkan seperti Camat Krian, Camat Jabon dan Camat Krembung. (adv/kr/jok/fdm)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Banser dan Warga Sarirogo Kecewa Bupati Tidak Tegas Tutup Toko Miras

Beri Deadline
Seminggu,
jika Tidak...

SIDOARJO - Keputusan Bupati Sidoarjo Subandi yang memberikan waktu satu bulan untuk menertibkan toko minuman keras (miras) menuai kekecewaan dari warga Sarirogo dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Sebab pemerintah tidak segera menindak usaha yang terbukti melanggar aturan dan malah memberi tenggat waktu.

Kasatkorwil Banser Jawa Timur Rizza Ali Faizin menilai penegakan peraturan daerah tidak perlu menunggu satu bulan apabila pelanggaran sudah ditemukan. Menurut dia, pemerintah



Kalau memang melanggar ya langsung ditindak, tidak perlu menunggu satu bulan."

Rizza Ali Faizin
Kasatkorwil Banser
Jawa Timur

memiliki kewenangan untuk bertindak begitu dasar hukumnya jelas. "Kalau memang melanggar ya langsung ditindak, tidak perlu menunggu satu bulan. Masya-



Kami menunggu keputusan bupati untuk turun."

Anas Ali Akbar
Kabid Penegakan Perda
Satpol PP Sidoarjo

rakat sudah terlalu lama menunggu kepastian," katanya kemarin (28/7).

Rizza mengungkapkan, pemerintah sendiri telah mencatat ada 16 toko miras yang beroperasi tanpa izin. Karena itu, dia meminta

komitmen Pemkab Sidoarjo untuk benar-benar memberantas peredaran miras di Kota Delta.

Dia juga menyoroti kinerja Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah yang hingga kini belum melakukan tindakan. Rizza bahkan memberi tenggat waktu satu pekan. "Jika dalam waktu satu minggu Satpol PP tidak (menindak, Red), biar Banser yang turun. Kalau memang tidak mampu menegakkan perda, lebih baik Kasatpol PP mundur saja," tegasnya.

Koordinator Forum Peduli Sarirogo Chusen Al Khozi turut menyampaikan kekecewaannya atas keputusan bupati. Menurut dia, pemerintah seharusnya segera menutup toko miras yang

terbukti melanggar, bukan memberikan waktu hingga satu bulan. "Yang kami minta sejak awal hanya penegakan aturan, jangan sampai masyarakat terus menunggu," ujarnya.

Satpol PP Menunggu Arahan Bupati

Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Sidoarjo Anas Ali Akbar menyebut pihaknya belum menjadwalkan penertiban terhadap 16 toko miras yang dinyatakan tidak berizin. Saat ini Satpol PP masih menunggu hasil koordinasi serta arahan dari pimpinan. "Kami menunggu keputusan bupati untuk turun, jangan sampai kami melakukan penindakan, ternyata keliru," kata Anas. (ful/eko)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sriatun Bagikan Barcode untuk Serap Aspirasi

SIDOARJO, SURYA - Anggota Komisi E DPRD Jatim dr Sriatun memanfaatkan masa reses untuk menyerap berbagai aspirasi di Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo. Di antara metode serap aspirasi yang dilakukan Sriatun adalah dengan memanfaatkan teknologi sebagai alternatif pencatatan manual.

Ini dilakukan saat anggota Fraksi PKB ini menggelar serap aspirasi di kawasan tengah kota Sidoarjo, Senin (27/7). Peserta yang hadir adalah perwakilan pemerintah desa, pelaku UMKM hingga tokoh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Sriatun membagikan barcode untuk mereka menyampai-

kan aspirasi.

"Jika sebelumnya masyarakat menyampaikan usulan secara tertulis dengan tangan, kali ini karena kita sudah berada di era teknologi, kami tidak membagikan kertas kepada audiens atau tamu undangan, sebagai gantinya, kami membagikan kode barcode," kata Sriatun saat dikonfirmasi disela kegiatan.

Hal tersebut menjadi salah satu terobosan yang diperkenalkan Sriatun. Melalui barcode itu, mereka dapat mengetahui program apa saja yang dimiliki oleh Pemprov Jatim. Nantinya, program apa saja yang banyak mendapat aspirasi bakal dijadikan sebagai prioritas. Namun demikian,

perwakilan perangkat desa ini juga bisa berkeluh kesah atau menyampaikan aspirasi tentang apa yang dibutuhkan di daerah.

Menurut Sriatun, pihaknya sengaja melakukan pendekatan semacam ini. Tujuannya, memastikan agar aspirasi yang disampaikan masyarakat sesuai dengan apa yang juga menjadi perencanaan daerah atau program Pemprov Jatim. Meskipun tak menutup peluang untuk aspirasi lain. "Misalnya ada keluhan kesah atau usulan dari lingkungan mereka yang belum tercantum dalam rumusan tersebut, mereka tetap diperbolehkan untuk mengungkapkannya,"

tandas Sriatun.

Pertemuan di salah satu kafe di Sidoarjo ini menjadi titik ketiga reses Sriatun. Sebelumnya, istri dari Bupati Sidoarjo Subandi ini menggelar serap aspirasi di kawasan Kecamatan Tulangan. Tepatnya, di dua lokasi yang berbeda. Di antara aspirasi yang sudah dihimpun adalah pentingnya pelatihan bagi UMKM.

Kecamatan Tulangan sebagai salah satu sentra meubel dan pembuatan kerajinan ini membutuhkan tambahan perhatian dari pemprov berupa pelatihan maupun akses permodalan. Sriatun memastikan akan mengawal aspirasi ini. "Mudah-muda-

han ini dapat kami usulkan ke pemerintah provinsi agar bisa terakomodasi, terakomodasi dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," jelasnya.

Sebagai informasi, DPRD Jatim saat ini memang tengah memasuki masa reses. Setiap anggota DPRD Jatim akan kembali ke dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi dari masyarakat melalui berbagai pertemuan yang dilakukan. Reses ini berlangsung sejak 25 Juli dan akan berakhir pada 1 Agustus.

Sekretaris DPRD Jatim M Ali Kuncoro menjelaskan bahwa reses 120 anggota dewan ini bakal menyasar



SERAP ASPIRASI - Anggota Komisi E DPRD Jatim dr Sriatun menggelar Reses atau serap aspirasi di kawasan Sidoarjo, Senin (27/7).

ratusan titik di Jatim. Total, ada 720 titik pertemuan dengan warga yang tersebar di 14 dapil se-Jatim dalam sepekan masa reses. "Sesuai

konstitusi yang berlaku, ini adalah bagian penting bagi seluruh anggota DPRD Jatim," kata Ali Kuncoro, Minggu (26/7). **[yua]**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DPR RI Sidak SPPG Wonoayu, Puji Standar Keamanan Pangan

WONOAYU-Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono memastikan kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Pagergumbuk, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, memenuhi standar keamanan pangan. Bahkan, usai memeriksa seluruh proses pengolahan makanan, Bambang mengaku puas dan menilai makanan yang disajikan sehat serta memiliki cita rasa yang tetap lezat meski tanpa menggunakan penyedap rasa atau Monosodium Glutamate (MSG).

BERI BANTUAN: Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono saat mengecek kondisi SPPG Wonoayu, Sidoarjo.

● Ke Halaman 10



DPR RI Sidak...

Hal itu disampaikan Bambang Haryo usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPG Desa Pagergumbuk, Selasa (28/7). Dalam sidak tersebut, ia memeriksa secara langsung seluruh tahapan pengolahan makanan, mulai dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sistem sanitasi da-

pur, penyimpanan bahan baku, hingga rantai pendingin (cold chain) untuk bahan pangan yang mudah rusak. "Semua saya cek, mulai dari IPAL sampai penyimpanan bahan makanan. Suhu ruangan, kelembapan, pendinginan semuanya diperhatikan," ujar Bambang Haryo. Menurutnya, seluruh proses yang diterapkan SPPG Pagergumbuk telah mengikuti stan-

dar keamanan pangan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Beras premium disimpan di ruangan dengan suhu dan tingkat kelembapan yang terkontrol, sementara bahan makanan seperti daging ayam dan bahan segar lainnya wajib berada di dalam freezer hingga menjelang proses memasak. "Ayam dan bahan segar disimpan di freezer dan tidak boleh terlalu lama be-

rada di luar sebelum dimasak karena bisa menyebabkan pembusukan. Ini menurut saya sudah sangat baik," katanya. Tidak hanya meninjau proses pengolahan, Bambang juga mencicipi langsung menu yang disiapkan bagi para penerima manfaat. Ia mengapresiasi kualitas bahan baku yang digunakan, mulai dari beras premium hingga air mineral berkualitas yang disediakan.

"Saya tadi merasakan makanannya, ternyata enak sekali. Memang mungkin tidak seperti makanan yang banyak micinnya, tetapi justru ini makanan sehat. Tidak ada micin, rasanya tetap enak, seperti makanan rumah sakit yang memang dirancang untuk kesehatan. Ini yang harus dikonsumsi anak-anak sekolah," ungkapnya. (dik/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Cegah Lumpur Meluber

RATUSAN batang bambu dipancangkan secara rapat di sepanjang pinggiran tanggul darurat Lumpur Sidoarjo untuk memperkuat struktur tanah dan mencegah tanggul jebol kemarin (28/7). Petugas dari Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) juga menggunakan ekskavator untuk meninggikan bibir tanggul. (*)



Jawa Pos

Pemkab Bakal Tutup 16 Toko Penjual Miras Ilegal

KOTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mencatat sebanyak 16 toko dan warung penjual minuman keras (miras) tanpa izin telah terdata dan dipastikan akan ditutup.

Tak hanya itu, toko miras yang memiliki izin tetapi berada di sekitar sekolah maupun tempat ibadah juga akan dievaluasi dan berpotensi ditutup sesuai aturan yang berlaku.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Sidoarjo menciptakan lingkungan yang lebih aman sekaligus memperketat pengawasan terhadap peredaran miras.

Bahkan, Pemkab berencana merevisi Peraturan Daerah (Perda) agar penindakan terhadap miras ilegal maupun praktik prostitusi memiliki dasar hukum yang lebih kuat.



KOORDINASI: Bupati Sidoarjo Subandi dan stakeholder terkait menggelar rapat bahas miras dan prostitusi.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, hingga saat ini sudah ada 16 lokasi penjualan miras ilegal yang teridentifikasi. Namun, ia meyakini jumlah tersebut masih

jauh lebih banyak.

"Ini tadi yang sudah masuk kita kurang lebih ada 16 yang tidak berizin. Makanya ini kita sasar semua. Ini yang diketahui, ya. Yang

tidak diketahui ya banyak, banyak," ujar Subandi.

Menurutnya, pendataan akan terus diperluas dengan melibatkan camat, Kepolisian Sektor (Polsek), Koramil,

hingga pemerintah desa agar seluruh titik penjualan miras ilegal dapat terungkap.

"Yang paling tahu adalah camat, Polsek, dan Danramil. Nanti berkoordinasi dengan desa-desa setempat, memberikan masukan kepada Bupati, baru kita turun di lapangan," katanya.

Selain toko tanpa izin, Pemkab juga akan menindak toko miras yang memiliki izin tetapi lokasinya berdekatan dengan sekolah atau tempat ibadah.

Subandi menilai keberadaan toko semacam itu tidak layak karena berpotensi memberi akses yang mudah bagi anak-anak dan pelajar terhadap minuman beralkohol.

"Kalau ada izin tetapi berdekatan dengan sekolah dan lain-lain, ini kita tutup sesuai dengan Perda yang ada. Tidak mungkin di depan

● Ke Halaman 10



Pemkab Bakal Tutup...

sekolah ada penjualan minuman keras. Yang boleh membeli kan usia 21 tahun ke atas. Siapa yang mengawasi kalau anak SMP atau SMA yang datang?" tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah akan mengatur kembali ketentuan mengenai jarak lokasi penjualan miras dengan fasilitas pendidikan maupun tempat ibadah melalui revisi Perda.

"Nanti biarakan diatur regulasinya. Mudah-mudahan nanti Sidoarjo tidak ada miras kembali karena Sidoarjo sebagai kota santri," ucapnya.

Dalam rapat yang digelar bersama jajaran terkait, disepakati seluruh tempat penjualan miras tanpa izin akan ditutup. Pemkab juga menyiapkan perubahan regulasi agar pengawasan dan penindakan dapat dilakukan lebih efektif.

"Karena banyak peredaran miras

yang tidak ada perizinan, kita tutup. Warung-warung yang menjual miras kita tutup karena hari ini belum ada izin sama sekali. Juga nanti akan ada perubahan Perda yang harus kita lakukan," jelas Subandi.

Tidak hanya fokus pada peredaran miras, Pemkab Sidoarjo bersama aparat penegak hukum juga akan menasar rumah kos yang diduga menjadi lokasi praktik prostitusi. Operasi tersebut akan dilakukan secara bertahap

dan berkelanjutan.

"Ini akan turun juga kita. Saya bersama Pak Kapolres didampingi Satpol PP akan melakukan itu. Saya minta waktu dalam satu bulan ini insyaallah akan kita selesaikan dan setelah itu tetap intens. Tidak berhenti hari ini saja," katanya.

Subandi menyebut sejumlah wilayah seperti Krian, Jabon, hingga kawasan Pasar Larangan menjadi perhatian pemerintah dalam operasi tersebut.

Ia berharap langkah tegas itu mampu menekan peredaran miras ilegal dan praktik prostitusi sehingga menciptakan situasi yang lebih kondusif di Kabupaten Sidoarjo.

"Kita melihat kalau dibiarkan akan semakin menjamur. Ini yang akan kita fokuskan, supaya semua orang yang datang ke Sidoarjo tahu bahwa kita serius menertibkan pelanggaran-pelanggaran seperti ini," pungkasnya. (dik/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Atlet Sidoarjo Ambil Bonus Porkab di KONI

Sidoarjo, Bhirawa

KONI Sidoarjo, Selasa (28/7) kemarin, diserbu para atlet Sidoarjo. Mereka bukan demo, tetapi antre mengambil reward karena menjadi juara dalam PORKAB Sidoarjo 2026. belum lama ini. Ada atlet dari 8 Cabor yang datang ke kantor KONI Sidoarjo yang berada di jalan Pahlawan nomor 1 Sidoarjo itu. Diantaranya, Cabor dayung, Aeromodeling, kuda manahan, Jujitsu, tarung derajat, woodball, arung jeram dan kurash.

Di kantor KONI Sidoarjo, para

atlet yang termasuk pelajar SD, SMP, SMA dan mahasiswa itu, menerima sejumlah reward. Diantaranya, uang pembinaan, piagam penghargaan dan medali. Plt Ketua KONI Sidoarjo, Imam Purwanto, menyampaikan ada sebanyak 1.940 atlet Sidoarjo yang mendapat reaward karena prestasi mereka saat mengikuti PORKAB Sidoarjo 2026, yang telah digelar mulai 15 Juni hingga 30 Juni 2026. Mereka mulai dari juara 1, juara 2 dan juara 3. "Kami bersyukur

dan bangga, kegiatan PORKAB Sidoarjo tahun 2026 berhasil dengan lancar," komentar Imam. Informasinya, pembagian bonus akan dilakukan selama 4 hari. Diantaranya, 28 Juli, 29 Juli, 31 Juli dan 1 Agustus. Cabor yang dijadwalkan hadir saat pencairan reward berbeda-beda. Saat pencairan reward, Cabor yang dijadwalkan datang berbeda-beda. Ada yang sehari 5 Cabor, 6 Cabor, 8 Cabor dan paling banyak ada 9 Cabor. "Terima kasih atas prestasi atlet-atlet ini, mereka ini bibit -

bibit atlet Sidoarjo di masa depan," komentar Imam. Naura, siswi SMAN 3 Sidoarjo, atlet Cabor dayung Sidoarjo, yang menjadi salah satu juara dalam kegiatan PORKAB Sidoarjo 2026 ini, dalam kesempatan itu menyampaikan senang menerima reward dari KONI Sidoarjo. Sugeng, wali atlet, dalam kesempatan itu, juga menyampaikan senang dan bangga. Karena dua orang anaknya yang ikut dalam Cabor dayung juga memperoleh juara. [kus.wwn]

40 Calon Paskibra Digembleng Koramil 0215

Mojokerto, Bhirawa

HARIAN
Bhirawa
Berita Sidoarjo Bhirawa Online

Tawon Vespa "Ngantor" di Kantor PCNU



SIDOARJO – Tak ada yang menyangka, tepat di atas balkon lantai dua kantor PCNU Sidoarjo, "penghuni" lain diam-diam membangun rumah berukuran jumbo. Koloni tawon vespa membuat sarang yang besarnya lima kali kepala orang dewasa. Keberadaan sarang itu baru terungkap setelah tawon-tawon sering mondar-mandir di dalam ruangan. Beberapa kali

JUMBO:
Sarang tawon vespa di balkon baru ketahuan setelah mengganggu warga sekitar.

serangga tersebut bahkan menyerang dan mengganggu warga maupun pengunjung kantor. Merasa ada yang tidak beres, penjaga kantor pun menelusuri asal-usul kedatangan para tamu bersayap itu. Hasilnya cukup mengejutkan. Di balik atap balkon lantai dua, tersembunyi sarang tawon yang ukurannya sudah sangat besar. "Pelapor mengatakan bahwa sarang tersebut selama ini tidak diketahui," kata Humas Damkar BPBD Sidoarjo Yoli Wisnu. Laporan itu langsung ditindaklanjuti Regu 1 Rescue

Damkar BPBD Sidoarjo. Berbekal alat pelindung diri (APD) lengkap, petugas perlahan mendekati sarang yang berada di lokasi cukup sulit dijangkau. Proses evakuasi pun tidak semudah membalik telapak tangan. Setelah posisi aman, petugas menyemprotkan cairan khusus ke sarang. Koloni tawon sempat memberikan "perlawanan" dengan menyerang petugas. Beruntung, serangan itu dapat diantisipasi hingga akhirnya sarang berhasil dilepaskan dan dimasukkan ke dalam karung. (eza/eko)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Daftar Nama 16 Toko Miras di Sidoarjo ini Bakal Ditutup, Bupati Tegaskan Tanpa Tebang Pilih



Sidoarjo, petisi.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam waktu dekat akan menutup seluruh tempat-tempat penjualan minuman keras (miras) tanpa tebang pilih. Siap tegas itu disampaikan Bupati Sidoarjo, Subandi usai memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang rapat Delta Wicaksana Setda Sidoarjo, Senin (27/7/2026). Selain itu, Subandi juga memastikan akan menindak tegas tempat hiburan atau rumah karaoke yang diduga tidak sesuai ketentuan serta memberantas praktik prostitusi terselubung yang diduga menjadi pemicu bertambahnya angka kasus HIV. Penanganan terpadu terhadap berbagai persoalan itu telah disiapkan. Termasuk rencana operasi penertiban besar-besaran di sejumlah lokasi. Hadir dalam pertemuan itu, Kapolresta Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo serta ketua DPRD Sidoarjo dan perwakilan Kejari Sidoarjo serta Pengadilan Sidoarjo. Tampak pula Kepala BNN Sidoarjo, Ketua PCNU Sidoarjo, serta perwakilan MUI Sidoarjo, perwakilan PD Muhammadiyah Sidoarjo, perwakilan DPD LDII Sidoarjo dan Ketua Banom PCNU Sidoarjo serta Ketua Komisi A,B,C,D DPRD Sidoarjo. Beberapa kyai Sidoarjo juga tampak hadir dalam kesempatan itu. Terlihat Kyai Nurkholis Misbah pimpinan Ponpes Al-Amanah Junwangi Krian serta Kyai Abdul “Beri kami waktu satu bulan untuk mengambil tindakan. Hari ini seluruh pemangku kepentingan lintas sektor sudah berkoordinasi untuk merumuskan langkah penanganan berbagai persoalan tersebut,” papar Subandi. Bupati Sidoarjo mengatakan saat ini baru diketahui 16 toko Miras tak berizin. Padahal ia yakin masih banyak toko Miras lainnya. Dipastikannya ke 16 toko tersebut akan ditutup.Berdasarkan data yang dipegang Sekda Fenny, terdapat 16 toko miras tak berizin di Sidoarjo, yakni Sobot Minum Kahuripan, Teman Santuyy Sidoarjo, Mimik Cantik, Toko Kawa Diponegoro, Libra Store, Pendekar Botol, Toko Kawa Pondok Mutiara, 23 Outlet HWG, Temen Santuyy, Banyu Joyo Sidoarjo, Anggur ABC Sedati, KeneAe Bottle Shop, Tipsy Tales, Sobot Minum Medaeng, King Bottle Shop, dan Outlet 23 HWG. “Ini tadi yang sudah masuk ke kita kurang lebih ada 16 yang tidak berizin. Makanya ini kita sasar semua. Ini yang diketahui, yang tidak banyak. Makanya kita sampaikan yang paling tahu adalah Camat, Kapolsek dan Danramil. Nanti kita minta juga berkoordinasi dengan desa-desa setempat. setelah memberikan masukan pada Bupati, baru kita nanti turun di lapangan,” ujarnya. Bupati Subandi akan memastikan menutup toko Miras yang tidak sesuai Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Seperti toko Miras yang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah maupun rumah sakit. Jika terdapat toko Miras yang melanggar Perda tersebut ia akan pastikan penutupannya meski berizin. “Meski dia ada izin namun berdekatan dengan sekolah dan lainnya, ini kita tutup, sesuai dengan Perda yang ada,” tandasnya. Subandi juga akan menindak tegas tempat-tempat praktik prostitusi terselubung. Seperti yang ada di Krian, Jabon dan juga di Pasar Larangan. “Tempat kos juga tidak akan luput dari penertiban. Pasalnya banyak tempat kos yang diduga digunakan sebagai tempat maksiat,” tegasnya. Ketua PCNU Sidoarjo KH. Zaenal Abidin mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang sangat tanggap terhadap persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ia berharap penertiban tempat-tempat penjualan miras dilakukan secara terus menerus. PCNU Sidoarjo ingin Kabupaten Sidoarjo benar-benar bersih dari miras dan bersih dari prostitusi yang akan merusak kader-kader bangsa yang akan memimpin Kabupaten Sidoarjo ke depan. “Kami berharap mudah-mudahan semua pejabat, stakeholder yang ada di Kabupaten Sidoarjo, wabilkhusus Pak Bupati, terus melakukan gerakan-gerakan untuk melakukan sweeping terhadap tempat-tempat penjualan miras,” tutupnya. (luk)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Tak Dapat Kompensasi Proyek Betonisasi Jalan, Pedagang Sidoarjo: Kami Dimatikan Perlahan



Sidoarjo, petisi.co – Ratusan pemilik aneka usaha di sepanjang jalan raya Bluru Kidul, mengeluhkan sepi pembeli akibat akses jalan utama ditutup sehubungan adanya pengerjaan betonisasi jalan dan perbaikan drainase. Warga di sekitar lokasi mengaku dirugikan dan terancam kehilangan pendapatan terhitung sejak pekerjaan proyek tersebut dimulai dari tanggal 14 Juli 2026 dan diperkirakan selesai Desember 2026. Kades Bluru Kidul, Mochammad Fatkhur (kiri) pastikan tidak ada kompensasi bagi pedagang terdampak proyek betonisasi jalan. “Proyek ini sudah jalan 2 minggu, karena akses jalanan utama ditutup. toko dan pedagang semuanya sepi, sama sekali gak ada pembeli. Dampaknya ya gak ada pemasukan. Kalau berlangsung seperti ini sampai 5 bulan ke depan ya rugi, trus makan apa kita,” Keluh Nuryati, Pemilik warung makan Jaya, Senin (27/7/2026). Demi menekan kerugian, sebagian pedagang di sepanjang jalan raya bluru kidul ini, mencoba nekat berjualan. Berharap dari upaya ini ada pemasukan. “Saya sudah 10 hari lebih tutup, hari ini coba buka jualan, sama dengan toko service hp sebelah. Kalau dihitung deretan usaha dekat tempat jualan saya ini ada sekitar 50 pedagang. harapannya dengan buka ini ada pemasukan,” ujarnya berharap. Saat kondisi normal sebelum adanya proyek, warungnya selalu ramai dipadati pembeli. Selain banyak yang makan ditempat, ada pula pelanggan pesan dibungkus untuk acara. “Sebelum ada proyek, pendapatan bersih bisa sampai Rp200.000 per hari. Itu belum termasuk yang pesan di bungkus untuk acara. Per orang yang datang kadang pesan sampai 100 bungkus. Kalau sekarang, gak bisa diharapkan. ini aja baru dapat 10 pembeli,” aku ibu 2 anak asal Tuban ini. Selain penjual warung makan, dampak kerugian juga dirasakan pedagang kelontong. Mereka rata-rata merupakan pendatang yang mengontrak lahan untuk buka usaha. “ini gak tahu lagi, bagaimana caranya bisa bayar kontrak sewa lahan. Untungnya barang dagangan saya, banyak yang titipan. Kalau gak laku diambil sama yang punya. Tapi kalau sepi pembeli begini, lama-lama bisa bangkrut,” aku Mariah, asal Madura. Para pedagang menyayangkan, proyek dijalankan tanpa pemberitahuan atau sosialisasi secara menyeluruh. Selain itu, penjual kecil menjadi kelompok yang paling terpukul dengan adanya proyek ini dan tidak dipikirkan solusinya. “Yang dapat surat edaran dari desa ya warga asli sini saja, yang punya usaha. Seperti saya dan warung-warung yang ngontrak gak dapat pemberitahuan. Kami tahunya ada proyek ini dari pemilik usaha lain yang diberi surat. Sebelumnya banyak yang mangkal seperti penjual minuman teh, gorengan onde-onde, fried chicken dan lainnya digusur suruh langsung pergi,” serunya. Ia berharap paling tidak ada



pemerintah memikirkan kompensasi. karena ini proyeknya selesainya cukup panjang. Dampaknya otomatis terasa banget. Saya dan suami makannya ya dari jualan ini, kalau sepi begini, gimana bisa bayar listrik, air dan lainnya,” tandas pemilik usaha yang telah merintis 23 tahun ini. Ia menyampaikan proyek ini secara tidak langsung menjadi mesin pembunuh bagi pemilik usaha secara perlahan. Disamping dampak ekonomi juga polusi lingkungan dari banyaknya debu yang ditimbulkan. Kondisi ini dirasa sangat merugikan pemilik warung makan. “Ini namanya, kami dimatikan pelan-pelan oleh pemerintah. Bayangkan 5 bulan lebih, tidak ada ganti rugi. Bagaimana dengan dagangan yang gak laku. Kalau makanan bisa terbang, berapa kerugian yang harus ditanggung. Belum lagi debunya, terbang kemana-mana. Sangat tidak nyaman bagi warung makan dan pembelinya,” cetusnya sambil menunjuk warung pangsit mie yang tutup total akibat proyek. Sementara itu, dikonfirmasi Kepala Desa Bluru Kidul, Mohammad Fatkhur membenarkan dampak penutupan akses dari pengerjaan proyek betul-betul dirasakan warganya. Terutama yang berjualan di siang hari, namun ketika malam akses dibuka normal seperti biasa. “Kalau dihitung dari ujung timur hingga barat, ada sekitar 100-an pedagang yang terdampak. Cuma ini khan ditutup dari pagi hingga jelang sore. Nah, malamnya jalan sudah bisa dibuka dan dilalui,” tuturnya. Terkait keinginan warga yang menghendaki kompensasi, Fatkhur mengaku sudah memperjuangkan hal itu ke pemkab. Akan tetapi memang tidak ada kompensasi yang diberikan. “Sudah saya tanyakan ke Pak Joko (Kabid Jalan dan Jembatan DPUBMSDA). Jawabannya memang tidak ada kompensasi. Tapi ya gimana lagi, kan nggak mungkin juga warga saya puasa selama itu (5 bulan),” ungkapny. Fatkhur menjelaskan pembangunan Jalan Bluru tetap dibutuhkan masyarakat. Terlebih, persoalan banjir selama ini menjadi salah satu keluhan warga yang berulang setiap tahun. Namun, dampak pekerjaan terhadap keberlangsungan usaha pedagang di sepanjang ruas tersebut juga perlu mendapatkan perhatian selama proyek berjalan. Informasi tambahan, saat ini progres proyek betonisasi telah mencapai 5,8 persen. Pekerjaan yang sedang berlangsung antara lain pemasangan saluran U-Ditch berukuran 60 x 80 sentimeter dan 100 x 100 sentimeter. (luk)

